



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI
KE PROVINSI SULAWESI TENGAH
PADA MASA RESES DI MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022 - 2023**

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 210 ayat (2) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III. Susunan Tim

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1.	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI III/ F-P. PAN
2.	H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.M	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
3.	TRIMEDYA PANJAITAN	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
4.	I WAYAN SUDIRTA	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
5.	NOVRI OMPUSUNGGU	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
6.	IRJEN. POL. (PURN) DRS. H. SAFARUDDIN	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
7.	H. RUDY MAS'UD, S.E., M. E	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
8.	DR. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
9.	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M. Hum	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
10.	EVA YULIANA, M. Si	ANGGOTA/F-P. NASDEM
11.	H. MOH. RANO AL-FATH, S. G., M. H	ANGGOTA/F-PKB
12.	HERU WIDODO, S. Psi	ANGGOTA/F-PKB
13.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
14.	Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-PKS
15.	Dr. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-PAN

Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung.

IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Reses ini dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023 sampai dengan 18 April 2023 di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palu, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu.
2. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. Penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

a. Bidang Anggaran

Total keseluruhan anggaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp1.141.422.558.000 dengan pembagian belanja barang sebesar Rp437.787.382.000 (38%), belanja modal Rp22.374.844.000 (2%) dan belanja pegawai sebesar Rp681.260.332.000. selanjutnya akan dijabarkan lebih detail pada tabel di bawah ini:

Sumber Dana	Jenis Belanja (Rp)			Jumlah
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
Rupiah Murni	681.260.332.000	365.719.250.000	11.062.752.000	1.058.042.334.000
PNBP	-	52.680.676.000	963.869.000	53.644.545.000
BLU	-	19.387.456.000	394.548.000	19.782.004.000
SBSN	-	-	9.953.675.000	9.953.675.000
Jumlah	681.260.332.000	437.787.382.000	22.374.844.000	1.141.422.558.000

b. Bidang Pengawasan

1. Gambaran situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah dipaparkan pada tabel di bawah ini:

a) Tindak Pidana dan Penyelesaian

Tahun	Lapor	Selesai	%
2022	6.957	5.143	73,9%
2023 (s.d Maret)	2.084	586	28,1%

b) Crime Index

Kasus	2022	Maret 2023
Curar	646	67
Curanmor	1.662	118
Aniaya berat	59	267
Curas	355	19
Kebakaran	47	1
Pembunuhan	27	7
Perkosaan	55	8
Kenakalan remaja	384	71
Uang Dok Palsu	57	-
Narkoba	249	144

c) Data Kecelakaan Lalu Lintas dan Pelanggaran

Uraian		2022	23 (s.d Maret)	
Kecelakaan	Jumlah Kecelakaan	1144	193	
	Korban	Meninggal Dunia	360	64
		Luka Berat	430	72
		Luka Ringan	1.383	216
Kerugian	5.287.050.250	978.700.000		
Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	329.347	55.150	
	Tilang	22.131	3.390	
	Teguran	307.216	51.760	

2. Kasus-Kasus yang menonjol yang terjadi di dalam wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah adalah:

a) Kejadian kecelakaan kerja di PT. GNI tahun 2022 sampai dengan 2023

- Tanggal 21 Oktober 2022 dengan korban meninggal atas nama Kehat Mosinta usia 24 tahun karena terjepit dan tergulung dalam mesin conveyor;
- Tanggal 9 November 2022 dengan korban meninggal dunia atas nama Darmawi usia 22 tahun akibat tersengat listrik;
- Tanggal 12 November 2022 terjadi ledakan mesin yang mengakibatkan Rivaldi usia 24 tahun mengalami luka bakar di seluruh tubuh;
- Pada tanggal 22 Desember 2022 di Smelter 2 area PT. GNI, terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan dua orang karyawan PT. TNI meninggal dunia dalam kondisi hangus terbakar
- Pada tanggal 01 Januari 2023 terjadi bunuh diri karyawan PT. GNI dengan cara melompat dari tower PLTU konstruksi PT. GNI (diduga bunuh diri karena depresi diakibatkan permasalahan keluarga dan pekerjaan;
- Kasus kecelakaan kerja juga menjadi salah satu isu tuntutan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dalam aksi unjuk rasa di PT. GNI.

b) Operasi Madago Raya tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

- Pada tahun Operasi Madago Raya tahun 2022 telah berhasil ditangkap empat orang POK DPO
- Pada tahun 2023 pasca penindakan dan tertangkapnya seluruh DPO teroris Mujahidin Indonesia Timur, maka kekuatan kelompok Mujahidin Indonesia Timur secara fisik mungkin sudah habis dan tidak ada lagi yang berada di tengah hutan/ pegunungan. Sehingga Operasi Madago Raya tidak lagi terfokus pada penegakan hukum, namun sudah beralih kepada kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Pelaksanaan Operasi Madago Raya tahun 2023 merupakan Operasi pemulihan keamanan melalui kegiatan deradikalisasi dan kontra redakalisasi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersifat terbuka dan tertutup dengan mengedepankan fungsi preemtif dan preventif yang didukung kegiatan kepolisian lainnya.

3. Menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, Polda Sulawesi Tengah mempersiapkan keamanan mudik dan arus balik. Adapun lokasi pengamanan operasi pengamanan Idul Fitri 1444 H tahun 2023 dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Wilayah	Jumlah					
	Lokasi Sholat Ied	Terminal	Pelabuhan	Bandara	Pusat Belanja	Objek Wisata
Polres Palu	469	2	2	1	8	6
Polres Sigi	304	0	0	0	4	7
Polres Donggala	303	2	3	0	4	6
Polres Parimo	145	1	1	0	6	10
Polres Poso	148	1	1	1	14	23
Polres Morowali	135	1	2	1	6	6
Polres Morut	130	0	5	0	5	5
Polres Touna	150	1	3	1	5	13
Polres Banggai	508	6	5	1	5	20
Polres Bangkep	225	1	4	0	7	17
Polres Toli-Toli	136	4	3	1	4	13
Polres Buol	213	1	6	1	8	21
Jumlah	2866	20	35	7	76	147

4. Adapun kekuatan personil yang dipersiapkan untuk operasi pengamanan Idul Fitri 2023 sebanyak 3.287 personel dengan penjabaran Polda Sulterng sebanyak 361 personel, Polres dan Jajaran sebanyak 1.062 personel dan instansi terkait sebanyak 1.864 personel. Terkait pos pelayanan, pos keamanan dan pos terpadu tersebar di seluruh wilayah Polda Sulawesi Tengah dengan jumlah pos pengamanan sebanyak 60 pos, pos pelayanan sebanyak 19 pos dan pos terpadu sebanyak 8 pos.

5. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah adalah:
 - a) Penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Polda Sulawesi tengah;
 - b) Penanggulangan terorisme, radikalisme dan intoleransi yang terjadi di wilayah Polda Sulawesi tengah;
 - c) Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan dan kelompok rentan;
 - d) Perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jaringannya;
 - e) Penanganan tindak pidana cyber;
 - f) Pelatihan sumber daya manusia Polri yang unggul dan berintegritas;
 - g) Pegamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar;
 - h) Penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia;
 - i) Penanganan objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan;
 - j) Perburuan dan penangkapan gembong terorisme Ali Kalora dan jaringan terorisme lainnya.

6. Tantangan yang dihadapi Polda Sulawesi Tengah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah:
 - a) Masih adanya stigma keberpihakan institusi Polri terhadap anggotanya;
 - b) Masih adanya kelompok masyarakat yang berpaham radikal dan membawa nama agama untuk kepentingan kelompoknya;
 - c) Stigma sosial dari masyarakat menyulitkan korban untuk bersuara dan pembuktian kasus yang rumit;
 - d) Sulitnya membentuk sistem terpadu yang menjalankan tugas penanganan mulai dari hulu hingga ke hilir;
 - e) Keterbatasan personil, keterbatasan penyidik dalam hal teknologi dan informasi, dan fasilitas yang belum memadai.

II. Penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

a. Bidang Anggaran

1. Berdasarkan RPJMN dan RKP Anggaran yang dialokasikan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp104.612.060.000 dengan realisasi sebesar Rp93.358.984.486. sedangkan pada tahun 2023 Pagu Anggaran Kejaksaan RI per jenis belanja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebesar Rp143.324.545.000 dengan realisasi sebesar Rp27.420.504.409 dan terdapat sisa sebesar Rp115.904.040.591.

2. Adapun program kerja prioritas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah adalah:

a) Program penegakan dan pelayanan hukum yang terbagi atas:

- Penegakan penyidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari;
- Penerangan dan penyuluhan umum;
- Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.

b) Program dukungan manajemen yang terbagi atas:

- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI, Kejati, Kejari dan dan Cabjari;
- Pembangunan/ pengadaan/ peningkatan saran dan prasarana Kejaksaan RI;
- Pengawasan apparatus kejaksaan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari

3. Terkait kebutuhan dukungan anggaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan tugas dan fungsi Kejati Sulteng membagi dalam kebutuhan perbidang, yaitu:

a) Bidang pembinaan

Kebutuhan dukungan anggaran dibutuhkan dalam meningkatkan tugas dan fungsi pada bidang pembinaan berdasarkan kebutuhan rill sejumlah Rp90.332.711.056

b) Bidang intelijen

Kebutuhan dukungan anggaran dalam meningkatkan tugas dan fungsi pada bidang intelijen berdasarkan kebutuhan rill sebesar Rp3.127.204.000

c) Bidang tindak pidana umum

Kebutuhan dukungan anggaran dalam meningkatkan tugas dan fungsi pada bidang tindak pidana umum berdasarkan kebutuhan rill sebesar Rp6.246.747.000

d) Bidang tindak pidana khusus

Kebutuhan dukungan anggaran dalam meningkatkan tugas dan fungsi pada bidang tindak pidana khusus berdasarkan kebutuhan rill sebesar Rp15.362.040.000

e) Bidang perdata dan tata usaha negara

Kebutuhan dukungan anggaran dalam meningkatkan tugas dan fungsi pada bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan kebutuhan rill sebesar Rp447.600.000. sedangkan untuk prioritas nasional kebutuhan dukungan anggaran sebesar RP52.950.000.000

b. Bidang Pengawasan

1. Sebagai upaya peningkatan pengawasan penanganan perkara di daerah (pada Kejaksaan Negeri), Kejaksaan Tinggi telah menerapkan langkah-langkah pengawasan, yaitu:
 - a) Pemberian petunjuk dan arahan dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana agar setiap tingkat penyelesaian perkara dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi sehingga dapat dilakukan penilaian dan memberikan arahan agar penyelesaian perkara dapat diselesaikan sesuai dengan SOP maupun hukum acara yang berlaku;
 - b) Dalam penanganan perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perhatian khusus pimpinan, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se wilayah hukum wajib memberikan laporan terhadap penanganan perkara, sehingga jika terdapat kendala maupun intervensi dari pihak lain maka dapat diambil langkah-langkah dan petunjuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Penanganan perkara yang menarik perhatian masyarakat tingkat pra penuntutan khususnya dalam tahap SPDP wajib melakukan ekspose bersama penyidik dan jaksa peneliti dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada penuntut umum tentang kasus posisi apa pidana tersebut, alat bukti berupa keterangan saksi-saksi ahli maupun petunjuk yang sudah dilakukan oleh penyidik namun tidak disediakan anggaran dalam kegiatan tersebut;
 - d) Dalam penanganan perkara khususnya perkara yang menarik perhatian masyarakat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sesuai dengan tupoksinya selalu mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia maupun sarana dan prasarana yang ada dengan tujuan tercapainya keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum.

Dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah berhasil menyetematkan keuangan negara sebesar Rp2.293.982.352,47. Sementara penyelamatan keuangan negara pada perkara yang ditangani di jajaran Kejati dan Cabjari pada bidang pidana khusus sejumlah Rp1.337.561.718.

2. Adapun upaya dan strategi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam penyelamatan keuangan negara dan asset negara berdasarkan laporan capaian kinerja bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah periode Januari sampai dengan Maret 2023 telah berhasil dalam penyelamatan keuangan negara sebesar Rp201.440.000.000. terkait gugatan hukum atas nama penggugat Rastra Ndobe dalam perkara perdata Nomor: 116/ Pdt.G/2022/PN/Pal atas gugatan PT. Fortina Artha Sejahtera terkait izin usaha pertambangan.
3. Adapun upaya pendampingan hukum terdiri dari:
 - a) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale terkait Pelabuhan Bungku;
 - b) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale terkait Pelabuhan Kolonodale;

- c) Dinas Bina Marga dan penataan ruang Provinsi Sulawesi Tengah terkait Paket Pekerjaan Tahun Jamak Rekonstruksi Jalan Tahun Anggaran 2022–2024;
 - d) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah terkait Paket Pekerjaan Tahun Jamak Rekonstruksi Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah Tahun ANgggaran 2022-2024.
4. Adapun pemulihan keuangan negara selama tahun 2022 sebesar Rp652.665.651 dan penyelamatan keuangan negara selama tahun 2023 adalah sebesar Rp201.440.000.000.
 5. Beberapa perkara yang menarik perhatian masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah adalah:
 - a) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Perkara TPPU Narkotika yang pelakunya berada di Lapas Kelas I Kota Palu yang masih memiliki harta kekayaan tidak wajar, sedangkan pelakunya masih mengalami pemidanaan.
 - b) Narkotika
Pegawai kejaksaan Negeri Palu yang menggelapkan barang bukti narkotika dan menjualnya kepada masyarakat.
 6. Adapun penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang sudah dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebanyak 41 perkara dan pada tahun 2023 10 perkara.
 7. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif adalah;
 - a) Sulitnya mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;
 - b) Minimnya perkara yang disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum mengingat penyidik Kepolisian juga melaksanakan program penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif
 - c) Anggaran masing-masing satuan kerja di Kejaksaan Negeri maupun di Cabang Kejaksaan Negeri masih perlu ditingkatkan mengingat kebutuhan untuk menghadirkan para pihak yang berperkara
 8. Langkah-langkah yang menjadi terobosan adalah:
 - a) Sebagai program unggulan Kejaksaan Republik Indonesia di bidang tindak pidana umum, untuk pelaksanaan restorative justice Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah meresmikan pembentukan berdirinya rumah restorative justice pada setiap satuan kerja Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri se wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebanyak 25 rumah Restorative Justice Kejaksaan
 - b) Aparat kejaksaan selalu melaksanakan sosialisasi tentang restorative justice kepada masyarakat baik melalui program pembinaan masyarakat taat hukum maupun melalui media massa lainnya baik elektronik maupun media cetak

- c) Untuk penerapan restorative justice perkara narkoba, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah meresmikan dua Bale Rehabilitasi Adhyaksa yang berada di Kejaksaan Negeri Toli-Toli dan Kejaksaan Negeri Palu.

VIII. Penjelasan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah

a. Bidang Anggaran

1. Pada tahun 2022 Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Tengah memperoleh pagu anggaran sebesar Rp163.756.075 dengan realisasi sebesar Rp162.832.648.165 (99,43%). Sedangkan pada tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Tengah memperoleh pagu anggaran sebesar Rp154.137.374.000 dengan realisasi per 10 April 2023 sebesar Rp44.601.799.432 (28,94%). Berdasarkan nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Tengah berada pada urutan pertama terkait nilai IKPA, dengan nilai 99,56.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 2022 dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Jenis PNBP	PNBP 2022 (per 31 Desember 2022)		%
	Target	Realisasi	
Keimigrasian	37.467.750.000	161.442.029.079	431
Pemasyarakatan	76.985.000	75.683.870	98
AHU	Tidak ada target	7.423.200.000	-
HKI	Tidak ada target	534.700.000	-

3. Terkait data penerimaan PNBP Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 2023 dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Jenis PNBP	PNBP 2023 (per 31 Desember 2022)		%
	Target	Realisasi	
Keimigrasian	39.842.750.000	46.484.440.911	117
Pemasyarakatan	77.810.000	12.218.475	16
AHU	Tidak ada target	2.073.050.000	-
HKI	Tidak ada target	174.950.000	-

4. Program-program yang menjadi prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah adalah:
 - a) Peningkatan satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah;
 - b) Rehabilitasi/ Renovasi Instalasi Listrik pada Lapas/Rutan.
 - c) Pelaksanaan Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan:
 - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemasyarakatan;
 - Meningkatkan produktivitas narapidana dan klien pemasyarakatan menuju manusia mandiri;
 - Pendataan NIK Warga Binaan dan Anak Binaan;
 - Mewujudkan pemenuhan hak atas anak (semua Andikpas sudah mempunyai Kartu Identitas Anak).

- d) Peningkatan pemberian Layanan Keimigrasian dan pengawasan Keimigrasian dalam rangka mendukung investasi pada proyek strategis nasional di wilayah Sulawesi Tengah, dimana Sulawesi Tengah merupakan salah satu Penghasil Tambang Nikel terbesar di Indonesia.

b. Bidang Pengawasan

1. Strategi yang dilakukan Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Tengah dalam pembentukan Produk Perundang-Undangan Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkualitas dan akuntabel adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dalam hal pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b) Optimalisasi Peran Perancang Peraturan Perundang-undang dengan upaya peningkatan kualitas tenaga Perancang melalui berbagai pelatihan/ Bimtek dan pendalaman materi;
- c) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka fasilitas harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah secara online (daring).

2. Adapun program-program yang dilaksanakan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait produk hukum (seperti KUHP) adalah:

- a) Penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam bentuk dialog terkait KUHP dengan melibatkan peserta dari Organisasi Bantuan Hukum, Akademisi, serta Tokoh Agama/ Masyarakat. dimana dialog dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah;
- b) Penyuluhan hukum melalui Temu Sadar Hukum bertemakan tentang KUHP yang dilaksanakan di beberapa Kabupaten/ Kota;
- c) Dialog interaktif di RRI Palu terkait Peraturan Perundang-Undangan.

3. Berdasarkan data dari Divisi Pemasyarakatan, total kapasitas hunian pada Lapas/ Rutan di Sulawesi Tengah sebanyak 2044 orang. Sementara itu jumlah WBP saat ini sebanyak 3661 WIBP. Maka dari itu kondisi Lapas/ Rutan kantor wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Tengah saat ini sudah overcrowded 179%. Adapun data hunian Lapas/ Rutan se Sulawesi Tengah per 10 April 2023 dirinci pada tabel di bawah ini:

Satker	Jumlah WBP		Jumlah	Kapasitas	Overcrowded
	Tahanan	Napi			
Lapas Kelas IIA Palu	0	693	693	210	330%
Lapas Kelas IIB Tolitoli	29	198	227	215	106%
Lapas Kelas IIB Luwuk	105	343	448	227	197%
Lapas Kelas IIB Ampana	48	262	310	145	214%
LPP Kelas III Palu	27	140	167	165	101%
LPKA Palu	1	26	27	46	59%
Lapas Kelas III Parigi	70	244	314	150	209%
Lapas Kelas III Leok	31	131	162	170	95%
Lapas Kelas III Kolonedale	69	243	312	100	312%
Rutan Kelas IIA Palu	192	242	434	266	163%
Rutan Kelas IIB Donggala	127	212	339	250	136%
Rutan Kelas IIB Poso	83	145	228	100	228%
Total	782	2879	3661	2044	179%

4. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah melaksanakan program re-integrasi yaitu: Pembebasan Bersyarat (PB); Cuti Bersyarat (CB); Cuti Menjelang Bebas (CMB); Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK); dan asimilasi. Dimana sejak Januari sampai dengan Maret 2023 telah melaksanakan program re-integrasi terhadap 277 orang WBP. Selain itu juga terdapat program diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (melalui mediasi atau dialog yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan), dimana program itu sudah dilaksanakan kepada 74 orang anak pada periode sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2023.

5. Dalam upaya pencegahan penyelundupan barang ilegal pada Lapas dan Rutan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Pembentukan Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkoba di lingkungan UPT Pemasyarakatan seluruh Sulawesi Tengah;
 - b) Telah dibentuk Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopatnal) di setiap UPT khususnya Lapas/ Rutan sebagai upaya deteksi dini terhadap penyelundupan barang ilegal terutama narkoba, ponsel dan barang ilegal lainnya;
 - c) Mengoptimalkan Peranan dan Fungsi Penjaga Pintu Utama (P2U) dimana setiap Orang dan barang yang masuk ke Lapas/Rutan dilakukan pemeriksaan;
 - d) Pelaksanaan Tes Kepada Pegawai dan WBP dalam rangka P4GN;
 - e) Upaya pencegahan terhadap penyelundupan arang ilegal melalui pengeledahan/ Razia;
 - f) Menjalin sinergitas dengan aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Tengah;
 - g) Pemasangan CCTV pada Lapas/ Rutan dalam rangka pemantauan keadaan Lapas/ Rutan.

6. Pengawasan orang asing yang masuk ke dalam wilayah hukum Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan beberapa strategi pengawasan, yaitu:
 - a) Pencegahan
 - Pengawasan terhadap kedatangan orang asing di Bandara (charter maupun regular), dan Pelabuhan Laut;
 - Melakukan pendekatan secara persuasif kepada penjamin maupun orang asing agar supaya keberadaan mereka di Indonesia adalah legal sesuai dengan peruntukannya (alih status);
 - Kerjasama antar APH dalam hal pertukaran informasi yang berkaitan dengan orang asing dan keamanan regional (Tim PORA);
 - Melakukan pertemuan secara rutin maupun insidental dengan pihak-pihak terkait guna mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan;
 - Mewajibkan para penjamin untuk melaporkan keberadaan orang asing kepada kantor Imigrasi setempat.

b) Penindakan

- Melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia;
- Melakukan Tindakan Penegakan Hukum jika ada indikasi pelanggaran keimigrasian berupa Projustitia terhadap orang asing maupun WNI, sampai saat ini nihil.

7. Data-data kegiatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah hukum Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah;

a) Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

Jenis TAK	2022	2023
Pendetensian	3	-
Deportas	5	-
Pemindahan Deteni	1	-
Biaya Beban	106 hari	-

b) Kegiatan Operasi Bidang Inteldakim Divisi Keimigrasian

Jenis Operasi	2022	2023
Operasi Intelijen	8 keg	2 keg
Operasi Pengawasan Mandiri	7 keg	1 keg
Operasi Gabungan	2 keg	-

c) Kegiatan Operasi Bidang Inteldakim Kanit Palu

Jenis Operasi	2022	2023
Operasi Intelijen	41 keg	10 keg
Operasi Pengawasan Mandiri	40 keg	4 keg
Operasi Gabungan	9 keg	2 keg

d) Rapat Tim PORA

Jenis Operasi	2022	2023
Divisi Keimigrasian	2 keg	1 keg
Kantor Imigrasi Palu	7 keg	2 keg
Kantor Imigrasi Banggai	4 keg	-

8. Sebagai upaya peningkatan kecepatan dan kualitas layanan, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Tengah melaksanakan beberapa strategi, yaitu:

a) Layanan paspor

- Melaksanakan pelayanan M-Paspor;
- Melaksanakan Eazy Passport;
- Melakukan layanan Paspor Siaga;
- Pelayanan Izin Tinggal bagi WNA.

b) Layanan hukum

- Pemanfaatan teknologi yang menciptakan alternatif layanan yang murah dan cepat melalui aplikasi silahum.com;
- Dengan hanya ada 2 (dua) orang Penyuluh hukum, Kanwil Kemenkumham Sulteng berinovasi dengan melakukan penyuluhan hukum secara Online.

- Peningkatan pengetahuan aparaturnya yang handal melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) Internal dalam mengolah substansi teknis untuk penyelesaian permasalahan produk hukum yang dihasilkan;
 - Pembentukan agensi layanan berbentuk mikro pada setiap Kab/Kota dengan pemanfaatan ASN daerah untuk pembimbingan teknis secara berkala, periode Jangka Pendek, Menengah dan Panjang hingga terbentuknya KPPH (Kantor Perwakilan Pelayanan Hukum) pada setiap Kab/Kota secara mandiri;
 - Peningkatan penyebaran Informasi Layanan Keimigrasian, AHU dan KI melalui berbagai macam Platform dan Media serta membuka stand layanan di Mall layanan Publik provinsi;
 - Melakukan pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) & Rencana Aksi HAM (RANHAM) seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah;
 - Peningkatan Kolaborasi dan sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum.
- c) Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Peningkatan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui edukasi/ diseminasi/ sosialisasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual
 - Pelaksanaan desiminasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pada masyarakat, instansi pemerintah serta pelaku usaha
 - Penegakan perlindungan kekayaan intelektual melalui Sertifikat Pusat Pembelajaran dan Pasar Tradisional di wilayah.
- d) Peningkatan kesadaran hukum dengan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum melalui Program Non Litigasi kerja sama dengan asosiasi pengacara, OBH dan LBH se wilayah Sulawesi Tengah kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, baik seminar, diskusi public, serta pemanfaatan media radio, media massa dan media sosial.

III. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Palu

a. Bidang Anggaran

1. Alokasi anggaran Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah:

Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi s.d 31 Maret 2023
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI		
Program dukungan manajemen	Rp61.816.080.000	30,25%
DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI		
Program penegakan dan pelayanan hukum	Rp163.322.000	38,16%

- a) Program prioritas dan strategi pencapaian target
- Program penegakan dan pelayanan hukum
 - Meningkatkan kualitas putusan yang dilakukan dengan cara diskusi, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Hakim yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung;

- Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, yang dilakukan dengan cara memantau penanganan perkara melalui aplikasi SIPP sampai tahap minutasasi perkara;
- Mempercepat pengiriman salinan putusan;
- Mempercepat pengiriman berkas perkara yang mengajukan upaya hukum lanjutan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara rutin, yang dilakukan secara langsung maupun daring, yang salah satu objek pengawasannya adalah penanganan perkara;
- Melakukan pembinaan dan pemeriksaan kepada Hakim dan Aparatur Pengadilan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik (hal tersebut jika ada pengaduan yang diterima);
- Meningkatkan layanan publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah layanan publik;
- Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk memperoleh informasi terkait penanganan perkara;
- Memberikan reward (penghargaan) kepada satuan kerja yang dinilai berprestasi dalam penanganan perkara, yang diserahkan dalam acara Refleksi Pencapaian Kinerja Tahunan di Pengadilan Tinggi Suteng.
- Program dukungan manajemen
 - Menyusun perencanaan kebutuhan dengan mengutamakan kebutuhan prioritas;
 - Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan biaya yang diperlukan;
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. Jika ada perubahan jadwal pelaksanaan, dilakukan review jadwal kegiatan yang dibahas secara bersama-sama dalam rapat dinas setiap bulan;
 - Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja (value for money), dengan cara:
 - Membatasi belanja operasional yang tidak urgent dan mengutamakan kebutuhan prioritas;
 - Mengoptimalkan penggunaan IT;
 - Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, rapat berjenjang dan pengawasan internal terkait pengelolaan keuangan, untuk mengetahui kendala dan solusi yang akan ditempuh.
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan ke seluruh Pengadilan Negeri yang salah satu objek pengawasannya adalah terkait pengelolaan keuangan;
 - Percepatan pelaksanaan belanja modal, yang pelaksanaannya dimulai sejak awal tahun anggaran;
 - Untuk belanja modal pelaksanaannya diawasi langsung oleh Hakim/Hakim Tinggi untuk monitoring dan evaluasi agar pelaksanaannya tepat mutu, tepat waktu dan tepat pembiayaannya.

- o Untuk menjaga kualitas pekerjaan konstruksi Pembangunan PT Sulteng pasca Bencana melibatkan Tenaga Ahli konstruksi dari akademisi Fakultas Teknik Universitas Tadulako untuk melakukan pengawasan.

Dukungan anggaran masih dipelrukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Peradilan Umum di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

b. Bidang Pengawasan

1. Keadaan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian Perkara	Sisa Tahun 2021	Tahun 2022			
		Masuk	Perkara yang Ditangani	Putus	Sisa
Pidana	10	187	197	178	19
Perdata	11	85	96	86	10
Tipikor	2	37	39	38	1
Jumlah	23	309	332	302	30

2. Adapun perkara banding yang menonjol pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selama tahun 2022 adalah:

- a) Perkara banding pidana (narkotika) : 89 perkara
- b) Perkara banding Tipikor (kerugian keuangan negara) : 38 perkara
- c) Perkara banding perdata (perbuatan melawan hukum) : 61 perkara

3. Keadaan perkara di Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Perkara	Sisa Tahun 2021	Tahun 2022			
		Masuk	Perkara yang Dltangani	Putus	Sisa
PENGADILAN NEGERI PALU					
Pidana	91	456	547	453	94
Pidana Anak	3	21	24	24	0
Perdata	60	157	217	173	44
Tipikor	21	58	79	48	31
Perkara PHI	6	11	17	16	1
Jumlah	181	703	884	714	170
PENGADILAN NEGERI POSO					
Pidana	67	442	509	402	107
Pidana Anak	0	6	6	5	1
Perdata	47	159	206	163	43
Jumlah	114	607	721	570	151
PENGADILAN NEGERI LUWUK					
Pidana	45	226	271	219	52
Pidana Anak	1	13	14	14	0
Perdata	35	115	150	114	36
Jumlah	81	354	435	347	88
PENGADILAN NEGERI TOLITOLI					
Pidana					
Pidana Anak					
Perdata					
Jumlah					
PENGADILAN NEGERI DONGGALA					
Pidana	43	381	424	367	57
Pidana Anak	3	16	19	19	0
Perdata	8	35	43	38	5

Jumlah	54	432	486	424	62
PENGADILAN NEGERI BUOL					
Pidana	0	94	94	84	10
Pidana Anak	0	8	8	8	0
Perdata	0	21	21	19	2
Jumlah	0	123	123	111	12
PENGADILAN NEGERI PARIGI					
Pidana	30	196	226	200	26
Pidana Anak	0	1	1	1	0
Perdata	5	64	71	58	11
Jumlah	35	261	298	259	37

4. Dalam rangka pelaksanaan manajemen perkara guna mendukung peningkatan kinerja penyelesaian perkara, Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melaksanakan penggunaan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dengan melakukan penginputan data perkara dan semua proses penanganan perkara. Selain itu satuan kerja juga membangun inovasi yang mendukung penanganan perkara dan layanan publik yang tujuannya yaitu meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. Capaian kinerja penanganan perkara akan terbaca pada Aplikasi SIPP dari total poin EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) yang diperoleh. Kriteria penilaian penanganan perkara adalah kepatuhan, kesesuaian dan kelengkapan (untuk Pengadilan tingkat pertama) atau kinerja, kepatuhan dan kesesuaian (untuk Pengadilan tingkat banding) yang dilakukan secara otomatisasi.
5. Kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Pengadilan Negeri se Sulawesi Tengah dalam penyelesaian perkara secara cepat, mudah dan sederhana adalah :
 - a) Masih rendahnya kesadaran para pihak untuk memanfaatkan layanan sidang secara elektronik (e-court);
 - b) Masih kurangnya Pengetahuan SDM terkait pemanfaatan sarana Teknologi Informasi, sehingga diperlukan pelatihan khusus terkait penggunaan teknologi informasi;
 - c) Masih kurangnya peralatan pendukung yang memadai, komputer/ laptop, printer, layar monitor dan scanner;
 - d) Pelaksanaan sidang elektronik sering terkendala dengan listrik dan jaringan internet;
 - e) Kurangnya jumlah pegawai, baik teknis dan kesekretariatan.
6. Permasalahan eksekusi yang kerap terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah:
 - a) Kurangnya dukungan pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi;
 - b) Adanya perlawanan dari pihak tereksekusi (dengan melakukan provokasi terhadap masyarakat sekitar).

IV. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

a. Bidang Anggaran

1. Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) Pengadilan Agama Palu pada tahun 2023 sebesar Rp68.348.161.000. sedangkan DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) Pengadilan Agama Palu pada tahun 2023 dirincikan pada tabel di bawah ini:

Satker	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
Pembinaan dan Pengawasan	Rp187.586.000	Rp93.045.575	Rp67.540.425
Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan	Rp34.500.000	Rp24.649.500	Rp9.850.500

2. Pengadilan Tinggi Agama Palu mencanangkan tiga program prioritas, yaitu:

a) Mempersiapkan rencana aksi, kegiatan dan dokumentasi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan melakukan:

- Manajemen perubahan
- Penataan tata laksana;
- Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia
- Penguatan akuntabilitas kinerja;
- Penguatan pengawasan;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;

b) Program prioritas optimalisasi prestasi dengan melakukan:

- Mendata dan mengkalkulasikan prestasi yang telah dicapai;
- Mempersiapkan meraih prestasi baru;
- Mempertahankan prestasi yang telah diraih (reputasi);
- Mendokumentasikan prestasi yang telah diraih (prasasti).

c) Program prioritas meningkatkan performa pengadilan, dengan cara:

- Revitalisasi PTSP;
- Decorum ruang sidang;
- Menjadikan seluruh ruangan, halaman, tempat parkir, lapangan dan taman menjadi tempat selfie;
- Menjaga penampilan seluruh pegawai (memakai atribut dan disiplin pakaian);
- Mengoptimalkan kegiatan 5 RIN.

b. Bidang Pengawasan

1. Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu dari sisa perkara tahun 2021 sebanyak 64 perkara, dan perkara diterima pada tahun 2022 sebanyak 6.268 perkara, kemudian perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 diputus sebanyak 5.771 perkara dan dicabut oleh para pihak sebanyak 503 perkara sehingga sisa perkara pada tahun 2022 sebanyak 58 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Sisa 2021	Terima 2021	Total 2022	Cabut	Putus	Sisa 2022
PA Palu	22	1.313	1.335	140	1.169	26
PA Luwuk	7	854	861	83	778	0
PA Poso	2	224	226	14	212	0
PA Tolitoli	8	552	560	34	524	2
PA Donggala	16	657	673	51	616	6
PA Buol	0	389	369	29	336	4
PA Bungku	5	776	781	74	687	20
PA Banggai	0	356	356	27	329	0
PA Parigi	4	617	621	27	594	0
PA Ampana	0	550	550	24	526	0
Jumlah	64	6.268	6.332	503	5.771	58

2. Adapun keadaan perkara yang ditangani pada tingkat pertama berdasarkan jenis perkara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total 2022	Cabut	Putus	Sisa 2022
Izin poligami	0	4	4	0	4	0
Pencegahan perkawinan	0	0	1	0	1	0
Penolakan perkara oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan perkawinan	0	1	1	0	0	0
Kelalaian atas kewajiban suami/ istri	0	0	0	0	0	0
Cerai talak	16	996	1.012	99	896	17
Carai gugat	32	3.415	3.447	258	3.152	27
Harta bersama	4	21	25	8	15	2
Pengasuhan Anak/ Hadaniah	1	22	23	10	12	1
Nafkah anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-hak berkas istri	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan anak	0	0	0	0	0	0
Pencabutan kekuasaan orang tua	0	1	1	0	1	0
Perwalian	1	106	107	10	97	0
Pencabutan kekuasaan wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan orang lain sebagai wali	0	0	0	0	0	0
Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0	0	0
Asal usul anak	0	16	16	4	12	0
Perkawinan campuran	0	0	0	0	0	0
Isbath nikah	0	1.102	1.102	51	1.047	4
Izin kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi kawin	0	417	417	14	402	1
Wali adhol	0	11	11	0	11	0
Ekonomi Syariah	0	2	2	2	0	0
Kewarisan	5	22	27	11	13	3
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	3	3	0	2	1
Wakaf	0	2	2	2	0	0
Zakat/ infaq/ shadaqoh	0	1	1	0	1	0
P3HP/ Penetapan ahli waris	1	91	91	23	68	0
Lain-lain	4	35	39	11	27	1
Jumlah	64	6.268	6.332	503	5.771	58

3. Adapun perkara pada tingkat banding, pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Palu menerima perkara banding sebanyak 14 perkara dan semuanya dapat diselesaikan tepat waktu, lebih rinci akan dijabarkan pada tabel berikut ini:

Satker	Sisa 2021	Terima 2021	Total 2022	Cabut	Putus	Sisa 2022
PA Palu	0	6	6	0	6	0
PA Luwuk	0	6	6	0	6	0
PA Poso	0	0	0	0	0	0
PA Tolitoli	0	0	0	0	0	0
PA Donggala	0	1	1	0	1	0
PA Buol	0	0	0	0	0	0
PA Bungku	0	0	0	0	0	0
PA Banggai	0	0	0	0	0	0
PA Parigi	0	0	0	0	0	0
PA Ampana	0	1	1	0	1	0
Jumlah	0	14	14	0	14	0

4. Keadaan perkara tingkat pertama yang diselesaikan pada tingkat banding berdasarkan jenis perkara, dapat dirinci pada tabel di bawah ini:

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total 2022	Cabut	Putus	Sisa 2022
Izin poligami	0	0	0	0	0	0
Pencegahan perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan perkara oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas kewajiban suami/ istri	0	0	0	0	0	0
Cerai talak	0	1	1	0	1	0
Carai gugat	0	4	4	0	4	0
Harta bersama	0	3	3	0	3	0
Pengasuhan Anak/ Hadaniah	0	1	1	0	1	0
Nafkah anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-hak berkas istri	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan anak	0	0	0	0	0	0
Pencabutan kekuasaan orang tua	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan kekuasaan wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan orang lain sebagai wali	0	0	0	0	0	0
Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0	0	0
Asal usul anak	0	0	0	0	0	0
Perkawinan campuran	0	0	0	0	0	0
Isbath nikah	0	0	0	0	0	0
Izin kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi kawin	0	0	0	0	0	0
Wali adhol	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	0	3	3	0	3	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	1	1	0	1	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Zakat/ infaq/ shadaqoh	0	1	1	0	1	0
P3HP/ Penetapan ahli waris	0	0	0	0	0	0
Lain-lain	0	1	1	0	1	0
Jumlah	0	14	14	0	14	0

5. Keadaan perkara tingkat kasasi di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu pada tahun 2022 sebanyak 12 perkara dan perkara tersebut dapat dirincikan pada tabel di bawah ini:

Satker	Sisa 2021	Terima 2021	Total 2022	Cabut	Putus	Sisa 2022
PA Palu	2	4	6	0	3	3
PA Luwuk	1	3	4	0	4	0
PA Poso	0	0	0	0	0	0
PA Tolitoli	0	0	0	0	0	0
PA Donggala	0	1	1	0	0	1
PA Buol	0	0	0	0	0	0
PA Bungku	0	0	0	0	0	0
PA Banggai	0	0	0	0	0	0
PA Parigi	0	0	0	0	0	0
PA Ampana	0	1	1	0	1	0
Jumlah	3	9	12	0	8	4

6. Berdasarkan jenisnya, perkara yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dirinci pada tabel di bawah ini:

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Total 2022	Cabut	Putus	Sisa 2022
Izin poligami	0	0	0	0	0	0
Pencegahan perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan perkara oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas kewajiban suami/ istri	0	0	0	0	0	0
Cerai talak	0	3	3	0	3	0
Carai gugat	0	3	3	0	1	1
Harta bersama	0	2	2	0	1	1
Pengasuhan Anak/ Hadaniah	1	1	2	0	1	1
Nafkah anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-hak berkas istri	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan anak	0	0	0	0	0	0
Pencabutan kekuasaan orang tua	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan kekuasaan wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan orang lain sebagai wali	0	0	0	0	0	0
Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0	0	0
Asal usul anak	0	0	0	0	0	0
Perkawinan campuran	0	0	0	0	0	0
Isbath nikah	0	0	0	0	0	0
Izin kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi kawin	0	0	0	0	0	0
Wali adhol	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	0	2	2	0	1	1
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Zakat/ infaq/ shadaqoh	0	0	0	0	0	0
P3HP/ Penetapan ahli waris	0	0	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1	11	12	0	8	4

Data perkara yang diajukan permohonan untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tahun 2022 sebanyak 3 perkara. Adapun tiga perkara tersebut masing-masing terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, Tolitoli dan Parigi. Tiga perkara yang diajukan PK tersebut masing-masing untuk jenis perkara cerai talak, harta bersama dan P3H/ Penetapan Ahli Waris.

7. Sisa perkara yang diputus sejak Januari sampai Desember 2022 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu berjumlah 58 perkara yang dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel di bawah ini:

Satker	Sisa Perkara yang belum diputus	Keterangan
PA Palu	26	Masih Proses
PA Luwuk	0	Nihil
PA Poso	0	Nihil
PA Tolitoli	2	Masih Proses
PA Donggala	6	Masih Proses
PA Buol	4	Masih Proses
PA Bungku	20	Masih Proses

PA Banggai	0	Nihil
PA Parigi	0	Nihil
PA Ampana	0	Nihil
Jumlah	58	

8. Adapun perkara perdata yang telah berhasil dimediasi sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022 sebanyak 172 perkara dan 584 perkara yang tidak berhasil dimediasi, selanjutnya lebih rinci pada tabel di bawah ini:

Satker	Perkara yang dimediasi 2021	Mediasi	
		Berhasil	Tidak Berhasil
PA Palu	198	27	167
PA Luwuk	127	39	88
PA Poso	20	4	16
PA Tolitoli	51	11	40
PA Donggala	74	1	73
PA Buol	37	13	24
PA Bungku	83	7	73
PA Banggai	64	31	33
PA Parigi	69	11	42
PA Ampana	56	28	28
Jumlah	779	172	584

9. Terkait masalah eksekusi, bahwa sebagian besar permohonan eksekusi yang masuk telah selesai dilaksanakan dengan berbagai metode, yaitu eksekusi rill, eksekusi damai, serta cabut. Namun masih terdapat beberapa eksekusi yang belum dilaksanakan karena terkendala oleh beberapa hal, adapun eksekusi yang masih berjalan dan kendala yang dihadapinya adalah:
- Perkara nomor 655/Pdt.G/2020/PA.Pal (1/Pdt.Eks/2022/PA.Pal). Adapun prosesnya sudah pada tahapan penialaian asset oleh kantor KJIPP tetapi pemohon belum siap dana untuk itu;
 - Perkara nomor 265/G/2021/PA.Lwk (1.Pdt.Eks/2023/PA.Lwk), masih dalam proses damai dan pihak meminta waktu 6 bulan.
 - Perkara Nomor 561/G/2022/PA.Lwk (2.Pdt.Eks/2023/PA.Lwk), telah dilaksanakan, namun ada pihak berada di luar kota dan terdapat dokumen yang belum ditandatangani, karena itu penetapan belum dibuat.

V. Penjelasan Ketua Pengadilan TUN Sulawesi Tengah

a. Bidang Anggaran

- Alokasi anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palu pada tahun 2022 sebesar Rp5.094.758.000 dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.079.324.128 atau sebesar 99,70%. Sedangkan untuk DIPA 05 (Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia) sebesar Rp47.1000.000 dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.000.000 atau sebesar 95.54%.
- Alokasi dukungan anggaran di tahun 2023 untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) sebesar Rp5.604.835.000 dan realisasi per 31 Maret 2023 sebesar Rp1.519.460.386 atau sebesar 27,11%. Adapun untuk DIPA 05 (Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia)

sebesar Ro45.600.000 dengan realisasi per 31 Maret 2023 sebesar Rp7.700.000 atau sebesar 16,45%.

3. Adapun program-program prioritas dan strategi pencapaian target Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palu adalah:

a) Program penegakan dan pelayanan hukum

- Meningkatkan kualitas putusan yang dilakukan dengan cara musyawarah, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Hakim yang dilakukan secara langsung maupun secara daring;
- Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara di tingkat pertama (maksimal 5 Bulan) yang dilakukan dengan cara memantau penanganan perkara melalui Aplikasi SIPP sampai tahap minutasasi perkara;
- Mempercepat pengiriman berkas perkara yang mengajukan upaya hukum lanjutan (Banding, Kasasi dan PK);
- Meningkatkan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna mempercepat dan mempermudah layanan publik; dan
- Memanfaatkan Teknologi Informasi guna mendapatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

b) Program pembangunan Gedung PTUN Pasca Bencana Alam Tahun 2018

- Menyusun perencanaan kebutuhan dengan mengutamakan kebutuhan prioritas;
- Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan biaya yang diperlukan;
- Mengadakan lelang kontraktor pengerjaan proyek;
- Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal bersama dengan kontraktor;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, guna mengatasi kendala yang dialami; dan
- Untuk menjaga kualitas pekerjaan konstruksi, PTUN Palu melibatkan Tenaga Ahli konstruksi dari kalangan akademisi independent dalam melakukan pengawasan.

b. Bidang Pengawasan

1. Perkara yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dipaparkan sebanyak 137 perkara dan tahun 2021 menyisakan 26 perkara yang harus diselesaikan di tahun 2022. Sehingga jumlah total dari siasa tahun 2021 dan perkara yang terdaftar sampai dengan tahun 2022 berjumlah 163 perkara.

2. Upaya hukum yang diajukan oleh para Pencari Keadilan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palu terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022 berjumlah 100 perkara dengan pembagian yaitu: Banding 71 perkara, Peninjauan Kembali 5 perkara dan Pemohonan Pelaksanaan Eksekusi 1 perkara.

3. Berikut permasalahan yang menjadi perhatian publik hingga menjadikan perkara Pemilihan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Perangkat Desa, menonjol yaitu:
 - a) Bahwa tidak terdapat aturan hukum ditingkat pusat maupun daerah yang mengatur secara khusus dan cepat mengenai penyelesaian sengketa proses dan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (PILKADES);
 - b) Pejabat Pemerintahan tidak dapat melaksanakan putusan karena adanya perubahan keadaan hukum setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c) Pemberhentian maupun Pengangkatan Kepala Desa maupun Perangkat Desa dilakukan tidak sesuai dengan wewenang, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d) Adanya kecenderungan oleh Kepala Desa yang baru dilantik untuk segera memberhentikan perangkat desa yang diangkat oleh Mantan Kepala Desa sebelumnya, dan lembaga upaya administratif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dipandang belum efektif dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh perangkat desa yang diberhentikan, sehingga PTUN mengambil sikap untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan laporan keadaan perkara tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, Pengadilan tata Usaha Negara Palu hanya menerima dua permohonan eksekusi dari perkara 15/G/2019/PTUN.PL dan 56/G/2021/PTUN.PL. berdasarkan dua permohonan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu membuat penetapan eksekusi dan menegaskan dalam penetapannya bahwa keputusan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
5. Dalam pelaksanaan eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki kelemahan sistem eksekusi, dimana hal tersebut kemudian menghambat proses jalannya eksekusi. Adapun kelemahan sistem tersebut, antara lain:
 - a) Tergugat tidak dapat melaksanakan amar putusan karena adanya perubahan keadaan atau aturan hukum setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam perkara kepegawaian dimungkinkan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palu untuk menertibkan penetapan yang berisi kompensasi kepada penggugat atas putusan yang tidak dapat dieksekusi oleh tergugat;
 - b) Pengaturan eksekusi baik uang paksa dan sanksi administratif yang belum terelaborasi dengan komprehensif, karena tidak adanya peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51/2009;
 - c) Tidak ada instrumen yang dapat memaksa Tergugat/pejabat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan sehingga penegakan putusan

- PTUN Palu diletakkan kepada law awareness (kesadaran hukum) dari pejabat tata usaha negara;
- d) Tidak ada aturan yang mewajibkan Tergugat untuk memberi informasi pelaksanaan putusan kepada PTUN Palu yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengawasan putusan, dan para pihak pada umumnya pasif dalam memberitahukan perkembangan pelaksanaan putusan;
 - e) Terbatasnya kewenangan Tergugat untuk melaksanakan eksekusi secara sempurna oleh karena pelaksanaan eksekusi harus melibatkan Pejabat Pemerintahan lain yang mempunyai kewenangan, karena hal tersebut disebabkan terjadi perubahan aturan hukum yang mencabut kewenangan tergugat untuk bertindak setelah putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap.

VI. Penjelasan Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah

a. Bidang Anggaran

Total alokasi anggaran BNN Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp25.474.120.000 yang terbagi menjadi dua program utama, yaitu: 1) Program Dukungan Manajemen sebesar RP19.001.980.000 dan; 2) Program Dukungan Manajemen Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebesar Rp6.472.140.000.

b. Bidang Pengawasan

1. Upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Tengah dalam P4GN adalah:

a) Pencegahan

- Program ketahanan keluarga anti narkoba
Program ketahanan anti narkoba merupakan upaya BNNP Sulawesi Tengah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba melalui peningkatan ketahanan keluarga, sehingga mampu mencegah anak maupun anggota keluarga lainnya dari penyalahgunaan narkoba. Dimana aspek utama dari peningkatan ketahanan keluarga adalah:
 - Memahami anak;
 - Memahami diri;
 - Mengubah perilaku;
 - Memahami perilaku agresif dan tekanan teman sebaya.

BNNP Sulawesi Tengah dan jajaran telah melakukan advokasi program Ketahanan Anti Narkoba pada tahun 2022 dengan melibatkan 70 keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak dan dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan.

- Program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (Desa Bersinar)
- Program ini bertujuan untuk membangun ketahanan keluarga sehingga dapat mencegah anggota keluarga terpapar penyalahgunaan narkoba, dimana penganggaran dan pelaksana kegiatan dilakukan oleh desa dan untuk desa.
- Program pengembangan soft skill dan teman sebaya
- Program pengembangan soft skill dan teman sebaya adalah program untuk memberikan pemahaman serta mengembangkan kemampuan

yang aplikatif kepada sekolah untuk memperluas nilai anak didik dalam menghadapi tantangan dan kemajuan teknologi yang sifatnya dapat diaplikasikan pada anak didik selanjutnya.

- Program penyebaran informasi dan edukasi
- Penyebaran informasi tentang bahaya dan cara pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah melalui:
 - Tatap muka/ Talkshow (Non DIPA);
 - Radio;
 - Surat kabar/ media cetak;
 - Media luar ruang (umbul0umbul atau baliho);
 - Gema War on Drugs yang melibatkan 111.241 orang (Non DIPA);
 - Penyuluhan melalui mobil keliling (Non DIPA);
 - Menggelorakan lagu mars BNN di sekolah-sekolah (Non DIPA);
 - Menggelorakan lagu mars BNN di Radio (Non DIPA).

b) Pemberdayaan masyarakat

- Pemberdayaan peran serta masyarakat
Pada tahun 2022 telah dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan kota/ kabupaten tanggap ancaman narkoba di instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, serta lingkungan lain seperti:
 - Rapat kerja teknis dengan berbagai stakeholder terkait dari masing-masing lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan badan usaha/ swasta dan lingkungan masyarakat;
 - Sinkronisasi dan asistensi pelaksanaan kota/ kabupaten tanggap ancaman narkoba pada dua lingkungan yaitu instansi pemerintah dan lingkungan masyarakat
 - Pelatihan penggiat anti narkoba pada instansi pemerintah (DP2KB Kota Palu, DB2KB Provinsi Sulawesi Tengah, BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, DP2KB Provinsi Sulawesi Tengah yang berjumlah 28 orang) dan lingkungan masyarakat Desa Mpanu dan Desa Ngata Baru yang berjumlah 30 orang.
- Pemberdayaan peran serta masyarakat
Program pemberdayaan alternatif yang dilakukan adalah bimbingan teknis life-skill pada satu lingkungan, yaitu Kelurahan Tatura Utara, Kota Palu. Jumlah peserta penerima manfaat adalah 15 orang. Dimana program dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat sebagai pendamping program. Bimbingan masyarakat teknis -life-skill yang diberikan adalah pembuatan gerobak dari baja ringan.
- Hambatan dalam pelaksanaan program-program tersebut adalah:
 - Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya refocusing
 - Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika belum maksimal

- Dengan melihat awasan rawan narkoba di Sulawesi Tengah berjumlah 38 kawasan, namun anggaran untuk pelaksanaan life skill hanya dapat dilaksanakan pada 1 kawasan rawan.
2. Pada tahun 2023 BNNP Sulawesi Tengah memiliki target 18 berkas perkara, dimana sampai bulan April 2023 telah berhasil menangani 17 berkas perkara. Dalam upaya mengedepankan Fungsi Rehabilitasi apabila terdapat tangkapan yang tidak memiliki barang bukti narkoba namun hasil tes urin dinyatakan positif, maka akan diserahkan kepada bidang rehabilitasi untuk menjalani rehabilitasi. Dan apabila terdapat barang bukti sesuai dengan SEMA 01 tahun 2014 akan dilakukan asesmen terpadu. Adapun koordinasi dan Kerjasama yang telah dilaksanakan dengan instansi terkait, yaitu:
 - a) Membentuk tim asesmen terpadu;
 - b) Melaksanakan patroli laut dengan bea cukai;
 - c) Mengungkap pengiriman paket narkoba lewat udara dengan bea cukai, Polres dan Polda Sulawesi Tengah;
 - d) Kerjasama dengan Kanwil Kemeumham dalam rangka memindahkan narapidana kategori Bandar ke Lapas Nusakambangan;
 - e) Koordinasi dengan pihak jasa pengiriman terkait pengiriman paket yang dicurigai berisi narkoba;
 - f) Kerjasama dengan Avsec Bandara terkait penangkapan Kurir Narkoba;
 - g) Koordinasi dengan pihak travel atau armada terkait pengiriman yang dicurigai paket narkoba antara provinsi dan kabupaten/ kota.
 3. Adapun kendala yang dihadapi adalah:
 - a) Pengungkapan jaringan kejahatan narkoba terhadap tersangka penganadali yang merupakan narapidana dalam Lapas. Adapun terhadap penyitaan Barang Bukti HP yang digunakan seringkali saat digeledah di sekitar lokasi, tidak lagi ditemukan;
 - b) Hasil rekomendasi TAT bagi tersangka dan/ atau terdakwa untuk menjalankan rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap belum dilaksanakan dengan baik;
 - c) Jauhnya balai rehabilitasi rawat inap menjadi kendala dalam menjalankan hasil rekomendasi TAT bagi tersangka dan/ atau terdakwa.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan IV Tahun 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka terdapat beberapa pokok hal penting atau saran yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Palu, Pengadilan tata Usaha Negara Palu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dan menerima penjelasan terkait kendala yang dihadapi.
2. Mendorong Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Tengah untuk fokus terhadap pengawasan peredaran narkoba di dalam Lapas dan overcrowded yang terjadi di Lapas/ Rutan.

3. Mendorong Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi tengah untuk fokus terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Hukum Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Tengah.
4. Mendorong ketegasan BNNP Sulawesi Tengah terkait perusahaan yang tidak mau melakukan tes urin
5. Mendukung terjadinya sinergitas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, BNNP, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam upaya pemberantasan narkoba yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah
6. Meminta BNNP dan Aparat Penegak Hukum terkait agar tidak fokus dalam melakukan penindakan terhadap para korban, namun kepada pelaku, pengedar dan bandar narkoba

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023**

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**



Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.

A-514